



*Jurnal Penelitian*

**POLITIK**

Vol.14, No.1, Juni 2017

# TRANSFORMASI IDENTITAS KEINDONESIAAN

- Dikotomi Identitas Keindonesiaan dan Kepapuaan Pasca Orde Baru
- Memaknai Kelas Menengah sebagai Aktor Demokrasi Indonesia
- Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara dan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) dalam Pemilu Pilkada DKI 2012
- Peranakan dan Serat Kekancangan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Yogyakarta
- Transformasi Pancasila dan Identitas Keindonesiaan

## RESUME PENELITIAN

- Peran Kerja sama IMT-GT dalam Pembangunan Konektivitas ASEAN
- Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan

## REVIEW BUKU

- Bahasa sebagai Arena dan Instrumen Kekuasaan

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 14	No. 1	Hlm. 1-108	Jakarta, Juni 2017	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	------------	-----------------------	-------------------

**Jurnal  
Penelitian Politik**



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial- politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

**Mitra Bestari**

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)  
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)  
Dr. C.P.F. Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)  
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)  
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)  
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)  
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)

**Penanggung Jawab  
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI  
Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

**Dewan Redaksi**

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)  
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)  
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

**Redaksi Pelaksana**

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)  
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

**Sekretaris Redaksi**

Esty Ekawati, S.IP., M.IP  
Devi Darmawan, SH

**Produksi dan Sirkulasi**

Adiyatnika, A.Md  
Prayogo, S.Kom

**Alamat Redaksi**

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com  
*Website*: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

**ISSN**

1829-8001  
Terakreditasi No. 726/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

## Jurnal Penelitian

# POLITIK

Vol. 14, No. 1, Juni 2017

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	i
<b>Catatan Redaksi</b>	iii
<b>Artikel</b>	
• <b>Dikotomi Identitas Keindonesiaan dan Kepapuaan Pasca Orde Baru</b> Aisah Putri Budiatri	1–15
• <b>Memaknai Kelas Menengah sebagai Aktor Demokrasi Indonesia</b> Wasisto Raharjo Jati	17–29
• <b>Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara dan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI): dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012</b> Dina Fadiyah	31–44
• <b>Peranakan dan Serat Kekancingan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Yogyakarta</b> Septi Satriani	45–54
• <b>Transformasi Pancasila dan Identitas Keindonesiaan</b> Siswanto	55–68
<b>Resume Penelitian</b>	
• <b>Peran Kerja Sama IMT-GT dalam Pembangunan Konektivitas ASEAN</b> Sandy Nur Ikfal Raharjo, dkk	69–83
• <b>Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan</b> Siswanto, dkk	85–98
<b>Review Buku</b>	
• <b>Bahasa sebagai Arena dan Instrumen Kekuasaan</b> Anggi Afriansyah	99–106
<b>Tentang Penulis</b>	107–108
<b>Pedoman Penulisan</b>	109–113

## CATATAN REDAKSI

Arus Globalisasi yang melanda dunia telah membawa perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Perubahan tersebut bisa bernilai positif jika globalisasi dimaknai secara bijak. Namun tak sedikit dampak negatif ditimbulkan oleh globalisasi akibat ketidakmampuan kita dalam memaknai dan menanggapi secara bijak. Indonesia, tak lepas dari arus globalisasi ini sehingga pola-pola perilaku masyarakat di segala aspek kehidupan pun bergeser. Kondisi ini memungkinkan terjadinya pergeseran identitas manusia baik itu akibat sosial-budaya maupun politik.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan lima artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan identitas Keindonesiaan. Artikel pertama yang ditulis oleh Aisah Putri Budiatri, ”Dikotomi Identitas Keindonesiaan Dan Kepapuaan Pasca Orde Baru”, memperlihatkan bahwa dikotomi antitesis antara identitas kepapuaan dan keindonesiaan belum selesai, meskipun beberapa upaya penyelesaian konflik, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus, telah diterapkan. Sebaliknya, dikotomi identitas hari ini justru semakin menajam dan berpotensi memperkeruh konflik.

Artikel berikutnya, “Memaknai Kelas Menengah Sebagai Aktor Demokrasi Indonesia”. Artikel yang ditulis oleh Wasisto Raharjo Jati ini membahas mengenai kelas menengah yang menjadi aktor baru dan menjadi identitas tersendiri dalam demokrasi di Indonesia. Tulisannya membahas mengenai akar demokrasi dalam setiap episode kemunculan kelas menengah dalam demokrasi Indonesia. Dan sejauh mana mereka ikut andil dalam proses demokratisasi di ruang publik. Sementara itu, artikel “Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara Dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012” yang ditulis oleh Dina Fadiah menawarkan diskusi mengenai relasi antara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-

Nara) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012. temuan bahwa ternyata organisasi masyarakat dapat berperan penting dalam sebuah pemilihan. Terbukti dengan adanya elit-elit lokal yang saat ini gencar mengandeng ormas sebagai timsesnya. Keberhasilan pengumpulan suara yang dihasilkan oleh ormas mungkin karena anggota ormas banyak tersebar luas dimana-dimana. Mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dsb. Hal ini membuktikan bahwa ormas menjadi identitas yang ada saat ini sudah tidak dapat dikatakan independen atau tanpa adanya campur tangan politik.

Pergeseran identitas juga terjadi di Kraton Yogyakarta yang dibahas dalam artikel “Peranakan Dan Serat Kekancingan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Yogyakarta” yang ditulis oleh Septi Satriani. Artikel ini membahas bagaimana peranakan dan serat kekancingan menjadi identitas abdi dalem Kraton Yogyakarta. Seperti layaknya dalam organisasi modern, keanggotaannya ditandai dengan salah satunya seragam peranakan. Peranakan tidak sekedar menggambarkan seragam abdi dalem melainkan di dalamnya terkandung makna adanya persaudaraan dan persatuan dengan Raja maupun diantara sesama abdi dalem. Penulis menyimpulkan bahwa peranakan dan serat kekancingan merupakan symbol identitas bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta. Dengan menggunakan peranakan dan serat kekancingan maka abdi dalem Kraton Yogyakarta memiliki identitas yang berbeda dengan orang kebanyakan.

Artikel terakhir membahas tentang “Transformasi Pancasila Dan Identitas Keindonesiaan” yang ditulis oleh Siswanto. Pancasila sebagai rujukan kehidupan politik dan sosial semakin melemah di tengah gempuran globalisasi yang semakin kuat mempengaruhi pola pikir dan perilaku bangsa Indonesia. Karenanya, masyarakat Indonesia perlahan

bergerak menuju kondisi kehilangan identitas keindonesiaannya. Oleh karena itu, tulisan ini melihat pentingnya wacana transformasi Pancasila sehingga diharapkan bisa menjadi solusi atas tantangan kebangsaan tersebut. Transformasi Pancasila dapat dilakukan melalui (1) Transformasi bersifat menyeluruh atau holistik, tidak bisa bersifat parsial. (2) Transformasi juga meliputi perubahan pola pikir masyarakat (mindset). (3) Transformasi ini juga perlu di landasi oleh cahaya ilmu pengetahuan.

Selain kelima artikel terkait identitas di atas, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Artikel pertama ditulis oleh Sandy Nur Iqbal Raharjo, “Peran Kerja Sama IMT-GT Dalam Pembangunan Konektivitas Asean”. Tulisan ini menganalisis arti penting IMT-GT bagi masing-masing negara anggotanya, implementasi program-program IMT-GT tahun 2012-2016, dan peran IMT-GT dalam membangun konektivitas ASEAN, khususnya di sektor maritim.

Artikel kedua, “Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional Di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan”, ditulis oleh Siswanto. Artikel ini mengkaji arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok di masa Reformasi. Seperti diketahui bahwa hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok yang sudah berlangsung sejak dekade 1950-an mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik dalam negeri masing-masing negara. Sesuatu yang menggembirakan bahwa di era Reformasi ini kerja sama bilateral tersebut semakin meningkat khususnya dibidang politik dan ekonomi. Hanya saja yang menjadi masalah bahwa kerjasama ini dihadapan kepada kondisi ketidakseimbangan (asymmetric power relations) yang berpengaruh terhadap posisi tawar (bargaining position) masing-masing negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan nasional (nasional power) yang lebih besar akan lebih mudah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dibanding dengan dengan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan nasional lebih kecil. Untuk mengimbangi hal itu, posisi Indonesia

sebagai negara kekuatan menengah (middle power) bisa menjadi instrumen strategi dalam menghadapi Tiongkok.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan review buku karya Fathur Rokhman & Surahmat “Bahasa Sebagai Arena Dan Instrumen Kekuasaan”. Review yang ditulis Anggi Afriansyah menelaah politik penggunaan bahasa dari beragam aspek. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi tetapi lebih dari itu, bahasa dapat menjadi alat yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan. Bahasa beroperasi sebagai piranti kekuasaan dan berhasil dimanfaatkan secara optimal oleh mereka yang memiliki niat berkuasa. Bahasa dapat digunakan untuk praktik dominasi, alat pergerakan, melanggengkan kekuasaan, mendulang suara dan memenangkan pemilihan, sampai meraih keuntungan materil.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai identitas Keindonesiaan. Selamat membaca.

## **Redaksi**

## Jurnal Penelitian

# POLITIK

Vol. 14, No. 1, Juni 2017

---

**DDC: 320.54 : 352.14**

**Aisah Putri Budiatri**

### **DIKOTOMI IDENTITAS KEINDONESIAAN DAN KEPAPUAAN PASCA ORDE BARU**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 1-15**

Narasi tentang dikotomi identitas keindonesiaan dan kepapuaan mewarnai hampir di setiap analisis mengenai identitas politik Papua. Kajian pendahulu berfokus pada pembahasan tentang pengalaman kolonial Belanda, sejarah integrasi Papua dan kegagalan pembangunan masa Orde Baru yang menjadi alasan kunci lahirnya pembelahan identitas antara keindonesiaan dan kepapuaan di Tanah Papua. Masa kolonial dan Orde Baru menjadi fokus studi mereka, karena pada masa ini identitas kepapuaan sebagai antitesis keindonesiaan lahir dan tumbuh semakin tajam. Lalu bagaimana dengan Pasca-Orde Baru? Tulisan ini memperlihatkan bahwa dikotomi antitesis antara identitas kepapuaan dan keindonesiaan belum selesai, meskipun beberapa upaya penyelesaian konflik, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus, telah diterapkan. Sebaliknya, dikotomi identitas hari ini justru semakin menajam dan berpotensi memperkeruh konflik.

**Kata kunci:** identitas, Papua, kepapuaan, keindonesiaan, konflik, paska Orde Baru

---

**DDC: 305.5**

**Wasisto Raharjo Jati**

### **MEMAKNAI KELAS MENENGAH SEBAGAI AKTOR DEMOKRASI INDONESIA**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 17-29**

Tulisan ini hendak menganalisis mengenai kelas menengah sebagai aktor demokrasi di Indonesia. Membicarakan kelas menengah dalam setiap diskursus ilmu sosial dan politik di Indonesia senantiasa dihadapkan pada pembahasan ekonomi secara kuantitatif. Hal yang perlu dicatat adalah keberadaan kelas menengah ini daripada didefinisikan lebih baik dirasakan keberadaannya dalam kehidupan. Posisi kelas menengah sebagai aktor politik di Indonesia masih fluktuatif. Hal ini dikarenakan kemunculan kelas menengah dalam arus demokrasi Indonesia yang masih ambigu. Kelas menengah ini bisa menjadi kelompok masyarakat yang tersubordinasi dengan negara, namun di satu sisi, kelas menengah juga tampil sebagai kelas masyarakat yang resisten dengan negara. Adanya transisi posisi dan status kelas menengah tersebut sebenarnya bisa disimak dari gerakan reformasi 1998 hingga sekarang ini. Munculnya berbagai macam gerakan politik dengan mengarustamakan demokrasi yang diinisiasi oleh kelas menengah menjadi hal yang terelakkan pasca reformasi ini. Semula, gerakan tersebut hanya berupa aksi penyampaian aspirasi dan kini sudah berkembang menjadi menjadi aksi penuntutan representasi. Adanya perubahan dalam pilihan aksi dan strategi itu menandakan bahwa kesadaran politik di kalangan kelas menengah Indonesia sendiri sudah semikian merata. Mereka tidak hanya menjadi aktor pasif secara politis namun juga aktif dalam menyuarkan aspirasi dan sekaligus pula representasinya. Menguatnya aksi representasi dari kelas menengah ini merupakan implikasi penting semakin menguatnya ranah societal terhadap

proses political, dan semakin berperannya netizen dalam menyuarakan kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai akar demokrasi dalam setiap episode kemunculan kelas menengah dalam demokrasi Indonesia. Sejauh mana mereka andil dalam proses demokratisasi di ruang publik.

**Kata kunci:** Demokratisasi, Kelas Menengah, Masyarakat

---

**DDC: 324.6**

**Dina Fadiyah**

**KUASA MERAH SUARA: RELASI  
FOKE-NARA DAN FORUM  
KOMUNIKASI ANAK BETAWI  
(FORKABI) DALAM PEMILUKADA  
DKI JAKARTA 2012**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 31-44**

Tulisan ini bermaksud melihat relasi antara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilu DKI Jakarta 2012. Pada dasarnya, Forkabi berdiri karena ketakutan etnis asli Jakarta yaitu etnis Betawi akan luntur karena banyaknya suku pendatang yang ada di Jakarta. Forkabi yang awalnya berdiri berdasarkan etnisitas tetapi kemudian menjelma menjadi perpanjangan politik dari suatu elit lokal. Ormas yang seharusnya bebas dari kepentingan-kepentingan politik, justru menjadi perpanjangan politik dari Foke-Nara selama masa kampanye dalam pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2012. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan didapatkan temuan bahwa ternyata organisasi masyarakat dapat berperan penting dalam sebuah pemilihan. Terbukti dengan adanya elit-elit lokal yang saat ini gencar mengandeng ormas sebagai timsesnya. Keberhasilan pengumpulan suara yang dihasilkan oleh ormas mungkin karena anggota ormas banyak tersebar luas dimana-mana. Mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dsb. Hal ini membuktikan bahwa ormas yang ada saat ini sudah tidak dapat dikatakan independen atau tanpa adanya campur tangan politik.

**Kata kunci:** Ormas, Forkabi, Patron, Klien

---

**DDC: 302.3**

**Septi Satriani**

**PERANAKAN DAN SERAT  
KEKANCINGAN: SEBUAH  
IDENTITAS ABDI DALEM KRATON  
YOGYAKARTA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 45-54**

Tulisan ini berisi tentang bagaimana peranakan dan serat kekancingan menjadi identitas abdi dalem Kraton Yogyakarta. Seperti layaknya dalam organisasi modern, keanggotaannya ditandai dengan salah satunya seragam peranakan. Peranakan tidak sekedar menggambarkan seragam abdi dalem melainkan di dalamnya terkandung makna adanya persaudaraan dan persatuan dengan Raja maupun diantara sesama abdi dalem. Penulis menyimpulkan bahwa peranakan dan serat kekancingan merupakan symbol identitas bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta. Dengan menggunakan peranakan dan serat kekancingan maka abdi dalem Kraton Yogyakarta memiliki identitas yang berbeda dengan orang kebanyakan.

**Kata kunci :** Identitas, Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Peranakan, Serak Kekancingan

---

**DDC: 320.509598**

**Siswanto**

**TRANSFORMASI PANCASILA DAN  
IDENTITAS KEINDONESIAAN**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 55-68**

Ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup semakin lama semakin ditinggalkan oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai rujukan kehidupan politik dan sosial semakin melemah di tengah gempuran globalisasi yang semakin kuat mempengaruhi pola pikir dan perilaku bangsa Indonesia. Karenanya, masyarakat Indonesia perlahan bergerak menuju kondisi kehilangan identitas keindonesiaannya. Oleh karena itu, tulisan ini melihat pentingnya wacana transformasi Pancasila sehingga diharapkan bisa menjadi solusi

atas tantangan kebangsaan tersebut. Transformasi Pancasila dapat dilakukan melalui (1) Transformasi bersifat menyeluruh atau holistik, tidak bisa bersifat parsial. (2) Transformasi juga meliputi perubahan pola pikir masyarakat (mindset). (3) Transformasi ini juga perlu di landasi oleh cahaya ilmu pengetahuan.

**Kata kunci:** Globalisasi, Identitas Keindonesiaan, Transformasi Pancasila

---

**DDC: 327**

**Sandy Nur Ikfal Raharjo**

### **PERAN KERJA SAMA IMT-GT DALAM PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS ASEAN**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 69-83**

*Indonesia-Malaysia—Thailand Growth Triangle* (IMT-GT) merupakan salah satu kerja sama ekonomi subregional yang diakui oleh ASEAN berperan penting dalam membangun konektivitas ASEAN. Namun demikian, perbedaan karakter geografis dan perbedaan kepentingan antartiga negara anggotanya berpeluang menghambat implementasi IMT-GT dalam membangun konektivitas tersebut. Studi ini difokuskan pada tiga hal, yaitu arti penting IMT-GT bagi masing-masing negara anggotanya, implementasi program-program IMT-GT tahun 2012-2016, dan peran IMT-GT dalam membangun konektivitas ASEAN, khususnya di sektor maritim. Melalui metode kualitatif bersifat deskriptif korelatif, studi ini menemukan bahwa IMT-GT berkontribusi hampir 50% bagi perekonomian Malaysia, mendukung visi Poros Maritim Dunia bagi Indonesia, serta mendorong kemajuan wilayah Thailand Selatan yang relatif tertinggal. Temuan lainnya, capaian program IMT-GT 2012-2016 masih rendah, terutama di sisi Indonesia akibat terlalu banyaknya program yang dicanangkan. Terakhir, IMT-GT berperan dalam membangun konektivitas ASEAN melalui pengembangan lima koridor ekonomi, walaupun masih lebih dominan pada dimensi darat dibanding dimensi maritim.

**Kata kunci:** ASEAN, IMT-GT, konektivitas, dan maritim

---

**DDC: 327.51**

**Siswanto**

### **POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP TIONGKOK: MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN NASIONAL DI TENGAH KETIDAKSEIMBANGAN KEKUATAN**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 85-98**

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok di masa Reformasi. Seperti diketahui bahwa hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok yang sudah berlangsung sejak dekade 1950-an mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik dalam negeri masing-masing negara. Sesuatu yang menggembarakan bahwa di era Reformasi ini kerja sama bilateral tersebut semakin meningkat khususnya dibidang politik dan ekonomi. Hanya saja yang menjadi masalah bahwa kerja sama ini dihadapan kepada kondisi ketidakseimbangan (*asymmetric power relations*) yang berpengaruh terhadap posisi tawar (*bargaining position*) masing-masing negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan nasional (*nasional power*) yang lebih besar akan lebih mudah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dibanding dengan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan nasional lebih kecil. Untuk mengimbangi hal itu, posisi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah (*middle power*) bisa menjadi instrumen strategi dalam menghadapi Tiongkok. Keberadaan sebagai kekuatan menengah didasarkan pada pada sejumlah indentifikasi yaitu kapasitas yang dimiliki dan perilaku politiknya dalam hubungan internasional sebagai inisiator diplomatik dalam mewujudkan stabilitas/keamanan dan perdamaian di kawasan. Akhirnya, sebagai penutup bahwa tulisan ini diharapkan akan memberi masukan terhadap arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok sehingga lebih memiliki posisi tawar dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya terhadap Tiongkok di tengah-tengah ketidak seimbangan kekuatan tersebut.

**Kata kunci:** Politik luar negeri, ketidakseimbangan kekuatan, kepentingan nasional

---

**DDC: 302.222**

**Anggi Afriansyah**

**BAHASA SEBAGAI ARENA DAN  
INSTRUMEN KEKUASAAN**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 99-106**

Buku ini menelaah politik penggunaan bahasa dari beragam aspek. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi tetapi lebih dari itu, bahasa dapat menjadi alat yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan. Bahasa beroperasi sebagai piranti kekuasaan dan berhasil dimanfaatkan secara optimal oleh mereka yang memiliki niat berkuasa. Bahasa dapat digunakan untuk praktik dominasi, alat pergerakan, melanggengkan kekuasaan, mendulang suara dan memenangkan pemilihan, sampai meraih keuntungan materil.

**Kata kunci:** bahasa, politik, kekuasaan, Indonesia

---

**DDC: 320.54 : 352.14**

**Aisah Putri Budiatri**

## **THE DICHOTOMY OF INDONESIAN AND PAPUAN IDENTITIES IN THE POST-NEW ORDER ERA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 1-15**

*The narratives about the dichotomy of Indonesian and Papuan identities are almost founded in every analysis of Papuan political identity. The previous research emphasis on the discussion about the Dutch colonial experience, the history of Papua's integration into Indonesia and the failure of development under New Order era as the key reasons for the genesis of the dichotomy. The colonial periode and New Order era have become their research focus since the Papuan identity as an antithesis of Indonesian-ness was born and grew under this political period. Then, how is about the political identities in Papua under Post-New Order? This article shows that the antithesis dichotomy between Papuan and Indonesian identities still occurs, even though several policies to resolve the conflict, including the Special Autonomy Law, have been implemented. In fact, the dichotomy of identities in Papua has sharpened and potentially worsened the conflict.*

**Keywords:** *identity, Papua, Papuan-ness, Indonesian-ness, conflict, post-New Order*

---

**DDC: 305.5**

**Wasisto Raharjo Jati**

## **UNDERSTANDING INDONESIAN MIDDLE CLASS AS DEMOCRACY**

## **PILLAR IN INDONESIA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 17-29**

*This article is aims to analyse middle class as one of the main actors in Indonesian democratization process. Discussion on middle class studies in Indonesian social and political science discourse have been dominated economic understanding based quantitative method. It was an academic challenges for Indonesian social scientist to redefine terminology of middle class. The position of middle class as the political actor in Indonesia still fluctuated due to unclearly standing in terms of relation state and society. On one hand, the middle class could perform as resistant groups against the political regime. In other hand, the Indonesian middle class presumably become subordinated groups towards the political regime. It can be indicated in Indonesia post Authoritarian era, the middle class groups performs itself as the political initiator from grass roots level. That main motivation from Indonesian middle class in recent political era are make alternative representation in order to articulate aspiration. The emergence of internet especially social media have been perceived as political machine that stimulated middle class to make critical points toward government today.*

**Keyword:** *Democratization, Middle Class, Society.*

---

**DDC: 324.6**

**Dina Fadiyah**

## **UNDERSTANDING INDONESIAN MIDDLE CLASS AS DEMOCRACY PILLAR IN INDONESIA**

*This paper intends to see the relationship between Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) with Forkabi in Jakarta 2012 Election. Basically, Forkabi stand up because they felt treat from immigrants. Forkabi originally founded on ethnicity but later transformed into a political extension of a local elite. CSOs that were supposed to be free of political interests, became the political extension of Foke-Nara during the campaign period in the 2012 Jakarta Governor election. This paper uses descriptive qualitative method and found that community organizations can play an important role in a local election. Proven with the local elites are currently aggressively used organizations as the tim to win the election. The success of this case because members of mass organizations are widespread everywhere. Starting from the level of RT, RW, Village, District, etc. This proves that the existing mass organizations can not be independent or do not have political interest.*

**Keywords:** Mass Organization, Forkabi, Patron, Client.

---

**DDC: 302.3**

**Septi Satriani**

**PERANAKAN AND SERAT  
KEKANCINGAN: AN IDENTITY OF  
“ABDI DALEM” IN YOGYAKARTA  
PALACE**

*This paper focus on how the concept of peranakan and serat kekancingan became the identity of abdi dalem of Kraton Yogyakarta. Peranakan is not just a uniform but the symbol of brotherhood and control of behavior. I assume that the peranakan and serat kekancingan is a symbol of identity. When the abdi dalem wearing a peranakan and having serat kekancingan,, they will behave according to the value that contained by them.*

**Keywords:** Identity, Abdi Dalem in Yogyakarta Palace, Peranakan, Serat Kekancingan

---

**DDC: 320.509598**

**Siswanto**

**THE TRANSFORMATION OF  
PANCASILA AND INDONESIAN  
IDENTITY**

*The ideology of Pancasila as the basis of the state and the worldview is increasingly abandoned by the Indonesian nation. Pancasila as a reference of political and social life is weakening in the midst of globalization that influence the mindset and behavior of the Indonesian people. Therefore, the people of Indonesia move to the condition that they lost of Indonesian Identity. This paper sees the importance of discourse about transformation of Pancasila, so that it is expected to be a solution to the challenge of nationality. Transfromasi Pancasila can be done through (1) Transformation is holistic, can not be partial. (2) Transformation also involves about changing the mindset of the community. (3) This transformation also needs to be grounded by the light of science.*

**Keywords:** Globalization, Indonesia Identity, Transformation of Pancasila

---

**DDC: 327**

**Sandy Nur Ikfal Raharjo**

**THE ROLE OF IMT-GT  
COOPERATION IN THE ASEAN  
CONNECTIVITY DEVELOPMENT**

*Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) is recognized as one of the sub-regional cooperation to support ASEAN Community. However, geographical character differences and consequently creating different interests among three member states, is likely to hinder the implementation of the IMT-GT in establishing such connectivity. This study focuses on three issues, namely, the significance of IMT-GT for each member state, implementation of IMT-GT's programs in 2012-*

2016, and the role of IMT-GT in building ASEAN connectivity, particularly in the maritime sector. Through correlative descriptive qualitative method, this study found that the IMT sub-region contributes nearly 50% for the Malaysian economy, supports the Indonesian vision of Global Maritime Fulcrum for Indonesia, as well as encourages the development of less-developed Southern Thailand region. In Addition, the implementation of IMT-GT's programs in 2012-2016 was still low, especially on the side of Indonesia due to too many programs were planned. Another finding was that IMT-GT has played significant role in building the ASEAN connectivity through the development of five economic corridors, although it was still more on land connectivity rather than maritime connectivity.

**Keywords:** ASEAN, IMT-GT, connectivity, and maritime

---

**DDC: 327.51**

**Siswanto**

**INDONESIAN FOREIGN POLICY  
TOWARD CHINA:  
FIGHTING THE NATIONAL  
INTERESTS IN ASYMMETRIC  
POWER RELATIONS**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 85-98**

*This paper would like to describe Indonesia's foreign policy towards China in the Reform period. As we known that Indonesia-China bilateral relations have been going on since the 1950s. The relations have ups and downs condition in accordance with the dynamics of domestic politics of each country. It is exciting that in Reform period that bilateral cooperation has been increasing especially in the field of politics and economy. In other hand, there is obstacle in this bilateral cooperation. The cooperation based on imbalance power relation (asymmetric power relations) which will affect to the bargaining position of each country in struggling for national interests. China as a nation with greater national power will be easier in fighting for its national interests compared to Indonesia as a country with smaller national power. To solve the obstacle, Indonesia's position as a middle power country can be a strategic instrument in facing China. Position as an middle power is based on a number of identifications of its capacity and political behavior in international relations*

*such as ; a diplomatic initiator in realizing stability / security and peace in the region. Finally, in closing remark that this paper is expected to give input to the direction of Indonesian foreign policy towards China so that it has more bargaining position in fighting its national interests against China in the midst of imbalance power (asymmetric power relations)*

**Keywords:** Foreign policy, power imbalance, national interest

---

**DDC: 302.222**

**Anggi Afriansyah**

**LANGUAGE AS FIELD AND  
INSTRUMENTS OF POWER**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 99-106**

*This book examines the use of language in variety aspects of life. Language is not only used as a medium of communication but more than that, can be an effective tool to gain power. Language operates as an instrument of power and successfully utilized optimally by those who have the intention to to get power. Language can be used to dominate others, means of struggle, preserve power, won the election, and achieve economic benefits.*

**Keywords:** Language, politic, power, Indonesia

**KUASA MERAIH SUARA: RELASI FOKE-NARA DAN FORUM  
KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) DALAM PEMILUKADA  
DKI JAKARTA 2012**

***POWER TO GET VOTTERS:  
RELATION BETWEEN FOKE-NARA AND FORKABI IN JAKARTA  
ELECTION 2012***

**Dina Fadiyah**

Jurusan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945  
Email: dinafadiyah@hotmail.com

Diterima: 15 Maret 2017; direvisi: 11 April 2017; disetujui: 9 Juni 2017

***Abstract***

*This paper intends to see the relationship between Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) with Forkabi in Jakarta 2012 Election. Basically, Forkabi stand up because they felt treat from immigrants. Forkabi originally founded on ethnicity but later transformed into a political extension of a local elite. CSOs that were supposed to be free of political interests, became the political extension of Foke-Nara during the campaign period in the 2012 Jakarta Governor election.*

*This paper uses descriptive qualitative method and found that community organizations can play an important role in a local election. Proven with the local elites are currently aggressively used organizations as the tim to win the election. The success of this case because members of mass organizations are widespread everywhere. Starting from the level of RT, RW, Village, District, etc. This proves that the existing mass organizations can not be independent or do not have political interest.*

***Keywords:*** Mass Organization, Forkabi, Patron, Client.

**Abstrak**

Tulisan ini bermaksud melihat relasi antara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilu DKI Jakarta 2012. Pada dasarnya, Forkabi berdiri karena ketakutan etnis asli Jakarta yaitu etnis Betawi akan luntur karena banyaknya suku pendatang yang ada di Jakarta. Forkabi yang awalnya berdiri berdasarkan etnisitas tetapi kemudian menjelma menjadi perpanjangan politik dari suatu elit lokal. Ormas yang seharusnya bebas dari kepentingan-kepentingan politik, justru menjadi perpanjangan politik dari Foke-Nara selama masa kampanye dalam pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2012.

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan didapatkan temuan bahwa ternyata organisasi masyarakat dapat berperan penting dalam sebuah pemilihan. Terbukti dengan adanya elit-elit lokal yang saat ini gencar mengandeng ormas sebagai timsesnya. Keberhasilan pengumpulan suara yang dihasilkan oleh ormas mungkin karena anggota ormas banyak tersebar luas dimana-dimana. Mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dsb. Hal ini membuktikan bahwa ormas yang ada saat ini sudah tidak dapat dikatakan independen atau tanpa adanya campur tangan politik.

**Kata kunci:** Ormas, Forkabi, Patron, Klien

## Pendahuluan

Forum Komunikasi Anak Betawi (selanjutnya disebut Forkabi) adalah organisasi masyarakat etnis Betawi yang berdiri karena ketakutan etnis asli Jakarta yaitu etnis Betawi akan luntur karena banyaknya suku pendatang yang ada di Jakarta.<sup>1</sup> Pada dasarnya Forkabi itu terbentuk karena kegelisahan masyarakat Betawi karena merasa etnisnya tidak pernah dibicarakan, dimunculkan ataupun dibahas di dalam media-media di Jakarta. Mereka beranggapan bahwa surat kabar nasional yang terbit di Jakarta itu berkantor di Jakarta, para pegawainya pun hidup di Jakarta dan Jakarta notabene adalah kampungnya orang Betawi, tapi tidak pernah menampilkan cerpen/cerita yang bernuansa Betawi.<sup>2</sup> Sehingga mereka merasa bahwa etnis Betawi semakin hari semakin terlupakan.

Forkabi didirikan oleh H. Husein Sani, beliau adalah salah satu dari tokoh Betawi. Kata Forkabi itu sendiri diusulkan pertama kali oleh H. Salman Muchtar, beliau juga salah satu tokoh Betawi. Forkabi terdiri dari 2 kata. For berarti untuk dan Kabi berarti pukulan. Resmilah pemakaian kata Forkabi pada organisasi yang baru lahir ini yang merupakan kependekan dari Forum Komunikasi Anak Betawi. Forkabi pun lahir dan menjelma menjadi sebuah organisasi kaum Betawi yang bergerak pada multi bidang yang menyangkut kepentingan kaum Betawi sebagai bagian dari pluralism DKI Jakarta.<sup>3</sup>

Sedangkan Fauzi Bowo atau biasa disebut Foke adalah Gubernur DKI Jakarta terpilih pada tahun 2007 yang berpasangan dengan Prijanto. Setelah masa baktinya pada tahun 2012 akan usai, Foke mencalonkan diri kembali menjadi kandidat calon Gubernur, kali ini berpasangan dengan Nachrowi Ramli (disingkat Nara). Nachrowi Ramli adalah seorang Mayor Jenderal Purnawirawan dan juga menjabat sebagai Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat DKI Jakarta.

<sup>1</sup> <http://forkabi.wordpress.com/about/> diakses pada tanggal 19 November 2013. Situs resmi didapatkan dari dr. H. Sibroh Malisi, salah satu Ketua Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jagakarsa, anggota Forkabi dan juga berprofesi sebagai dokter.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

Namun seiring berjalannya waktu, Forkabi mengalami pergeseran. Forkabi menjadi perpanjangan politik dari Foke-Nara selama masa kampanye dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2012. Faktanya, Forkabi sangat gencar dalam mengkampanyekan Foke-Nara dalam pilgub tersebut. Di kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan misalnya, para anggota Forkabi mengkampanyekan Foke-Nara dengan cara *door to door* atau dari rumah ke rumah. Mereka menyampaikan segala bentuk visi misi dari cagub tersebut, mulai dari *flayers*, buku, baju, *sticker*, hingga kaset cd.

Tulisan ini bermaksud ingin melihat pola patron-klien antara Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012, khususnya di kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Hubungan antara Forkabi dengan Foke-Nara, kemungkinan dapat dikategorikan sebagai pola patron klien. Patron klien merupakan budaya politik yang berjalan diatas prinsip relasi kuasa yang saling menguntungkan diantara mereka. Ciri-ciri hubungan patron-klien, menurut Scott adalah (1) terdapat suatu ketimpangan (*inequality*) dalam status dan pertukaran; (2) bersifat tatap muka; dan (3) bersifat luwes dan meluas.<sup>4</sup> Dalam hubungan Foke-Nara dan Forkabi, ketiga ciri tersebut kemungkinan mengarah kepada pola patron klien karena hubungan diantara mereka berawal dari kesamaan etnis yaitu etnis Betawi. Atas dasar tersebut, penulis mencoba menelaah lebih dalam mengenai pola patron klien yang terjadi di dalam pemilukada DKI Jakarta, khususnya di Kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan. Jagakarsa kemudian menjadi lokus yang dipilih oleh penulis karena selain Foke-Nara meraih kemenangan di daerah tersebut, kondisi masyarakat Jagakarsa yang memang secara kuantitas jumlah orang Betawinya tidaklah lebih banyak dari pendatang, pada kenyataannya sentimen etnis Betawi justru tetap laku dalam proses politik yang dilakukan oleh tim pemenangan Foke-Nara.

<sup>4</sup> James Scott.. "*Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia.*" *The American Political Science Review*, Vol. 66, No. 1 (1972a), hlm. 91. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/1959280>, diakses pada 30 November 2014

Secara umum, terdapat beberapa literature yang sebelumnya telah mengkaji tentang hubungan patron klien seperti yang telah dikaji oleh Rutinsyah dalam jurnal yang berjudul Hubungan Patron-Klien sebagai Strategi Pengembangan Ternak Sapi Perah di Pedesaan, Ia menjelaskan bahwa pola patron-klien terjadi antara petani dan pemilik ternak, pemilik dan peternak pekerja tetap, peternak dan pembeli dari produk susu dalam koperasi. Pola patron-klien petani dan pemilik umumnya kuat dan tahan lama karena mereka saling membutuhkan. Demikian pula, petani berhubungan dengan koperasi karena monopoli pembelian susu. Namun, hubungan antara pemilik dan pekerja pada umumnya tidak berlangsung lama karena para pekerja memiliki sarana independen untuk mempertahankan ternak sapi perah mereka, baik milik mereka sendiri atau orang lain. Maka, pola patron klien yang terjadi dalam penelitian tersebut terjadi karena saling membutuhkan satu sama lain.<sup>5</sup>

Lain halnya dengan penelitian Moh. Hefni dalam jurnal yang berjudul *Patron-client Relationship* pada Masyarakat Madura. Ia menjelaskan bahwa patron klien antara pemilik tanah sebagai patron dan petani sebagai klien, terjadi karena adanya ketimpangan ekonomi. Pemilik tanah yang notabene memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik memberikan uang sebagai upah dan petani memberikan tenaga untuk menggarap sawah.<sup>6</sup>

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut yang membahas patron klien dalam sector informal, Lande dalam *Leaders, Factions and Parties: The Structure of Philippine Politics* membahas patron klien dalam konteks formal dalam politik di Filipina. Lande menyebutnya sebagai “big people” dan “little people”. Menurutnya, hubungan “big people” dan “little people” terjadi karena adanya hubungan antar

kelas yang difasilitasi oleh sistem kekerabatan bilateral seperti kekeluargaan dan persahabatan.<sup>7</sup>

Dari beberapa kajian tersebut, penulis mencoba menelaah lebih dalam mengenai pola patron klien yang terjadi di dalam pemelukada DKI Jakarta, khususnya di Kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan. Jagakarsa kemudian menjadi lokus yang dipilih oleh penulis karena selain Foke-Nara meraih kemenangan di daerah tersebut, kondisi masyarakat Jagakarsa yang memang secara kuantitas jumlah orang Betawinya tidaklah lebih banyak dari pendatang, justru pada kenyataannya sentimen etnis Betawi justru tetap laku dalam proses politik yang dilakukan oleh tim pemenangan Foke-Nara.

Penulis menduga apa yang terjadi di Jagakarsa, merupakan akibat dari membaurnya budaya Betawi ke dalam budaya para pendatang. Misal; adanya beberapa budaya Betawi yang dikombinasikan oleh mereka para pendatang lewat berbagai kegiatan dan tradisi mereka seperti halnya pernikahan, bahasa dan lainnya yang digunakan oleh para pendatang. Ini yang membuat penulis memilih Jagakarsa sebagai tempat penelitiannya. Kondisi sosial masyarakat Jagakarsa yang sedemikian itu, menjadi alasan penulis memilih tempat tersebut.

Selain itu, etnis Betawi dikenal sebagai sosok yang loyal terhadap keetnisannya. Meskipun persentase kependudukan etnis Betawi sangatlah minim hanya sekitar 27,65%<sup>8</sup> di Jakarta, tetapi pada tahun 2012 Foke-Nara dapat meraih suara di atas 45%, hal ini dikarenakan etnis Betawi sangat loyal dalam mendukung etnisnya dalam hal-hal positif, terutama untuk menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta, karena masyarakat Betawi sendiri sudah sangat merindukan dan menginginkan agar Jakarta dipimpin oleh etnis asli Jakarta yaitu Betawi. Oleh karena itu, etnis Betawi bisa dengan mudah mempengaruhi etnis lain yang pastinya sudah lama bermukim di Jakarta dan sudah melewati pembauran budaya yang cukup lama, agar memilih kandidat yang beretnis Betawi.

<sup>5</sup> Lihat: Rutinsyah. *Hubungan Patron-Klien Sebagai Strategi Pengembangan Ternak Sapi Perah di Pedesaan* (Studi Kasus Peternak Sapi Perah di Desa Telogosari, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur), *Mozaik : Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 12, No.2. (2012).

<sup>6</sup> Moh. Hefni. *Patron-client Relationship pada Masyarakat Madura*. *Jurnal KARSA*, Vol. XV No. 1, (2009)

<sup>7</sup> Carl H. Lande. *Leaders, Factions, and Parties: The Structure of Philippine Politics*. *Journal of Southeast Asian History*, Vol. 7, No. 2 (1966), hlm. 145-149

<sup>8</sup> <http://www.jakarta.go.id/v2/search?q=kependudukan> diakses pada 28 November 2015.

Pola patron klien tidak hanya terjadi karena saling membutuhkan, ketimpangan ekonomi dan sistem kekerabatan seperti yang tertuang dalam literature review di atas, melainkan dalam kasus Foke-Nara dan Forkabi pola patron klien diduga berawal dari adanya kesamaan etnis yaitu etnis Betawi. Penulis beranggapan bahwa pola patron klien yang terjadi tidak hanya atas dasar kesamaan etnis semata, melainkan ada hal lain yang ikut menopang terbentuknya pola patron klien diantara keduanya dan penulis juga beranggapan bahwa hubungan antara Foke-Nara dan Forkabi, Foke-Nara sebagai patron tidak hanya menawarkan untuk meningkatkan eksistensi Betawi semata, namun juga ada hal lain yang ditawarkan oleh Foke-Nara terhadap Forkabi dalam pemilukada DKI Jakarta tahun 2012 di Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, penulis menarik rumusan masalah, bagaimana pola patron klien antara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilukada DKI Jakarta pada tahun 2012 di Kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan?

### Teori Patron-Klien

Beberapa literatur yang telah dihasilkan oleh beberapa ilmuwan sosial dan politik mengakui bahwa praktek-praktek kekuasaan patron-klien yang sudah ada pada masa pra-kolonial, tetapi berlangsung pada masa Orde Baru, bahkan hingga saat ini. Pendapat tersebut dibenarkan oleh Eko Sutoro yang melihat adanya ciri khas seperti, kedudukan, tingkah laku dan keseluruhan hirarki dalam struktur kekuasaan sebagian besar tergantung pada hubungan personal kekeluargaan atau antara patron (bapak) dan klien (anak buah).<sup>9</sup>

Konsep patron-klien sebenarnya berangkat dari teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) yang dikemukakan oleh Blau, bahwa ketidakseimbangan dalam masyarakat terhadap materi dan keadaan sosial adalah menghasilkan perbedaan dalam kekuasaan.<sup>10</sup> Maksudnya

struktur kekuasaan muncul karena terjadinya suatu hubungan pertukaran yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan pertukaran melahirkan kesenjangan kekuasaan dan ketidakseimbangan rasa hormat, sehingga menjadi sangat relevan dengan dasar hubungan patron-klien. Dalam konsep pertukaran sosial, mensyaratkan salah satu diantara dua pihak yang melakukan pertukaran harus memiliki sumber daya yang dibutuhkan oleh pihak lainnya, sedangkan pihak penerima (pihak lain tersebut) tidak memiliki sumber daya yang sama nilainya untuk dipertukarkan dengan pihak pemberi. Sehingga satu-satunya cara untuk membalas pertukaran ini adalah dengan memberikan kepatuhan (menerima posisi sebagai subordinasi) kepada pihak pemberi sumber daya tadi.

Secara konsep patron-klien lebih spesifik membahas tentang adanya pertukaran sosial. Salah satu ilmuwan sosial dan politik, Scott mengemukakan bahwa hubungan patron-klien sebagai hubungan pertukaran antara dua orang (*dyadic*) yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental, di mana seorang individu yang lebih tinggi status sosial ekonominya (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan perlindungan dan/atau keuntungan kepada seseorang dengan status lebih rendah (klien) yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan dukungan dan bantuan, termasuk jasa pribadi kepada patron.<sup>11</sup>

Dalam hubungan patron-klien, ada pihak yang menjadi superior (patron) dengan kelebihan status sosial dan ekonominya, dan pihak yang menjadi inferior (klien) karena status sosial dan ekonominya lebih rendah. Orang-orang berada pada posisi sebagai inferior tidak dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada kondisi seperti inilah sang patron membantu memenuhi kebutuhan kliennya dengan status dan sumber dayanya. Pelras menambahkan bahwa hubungan patron-klien digolongkan sebagai hubungan yang tidak sejajar (tetapi

<sup>9</sup> Eko Sutoro. *Transisi Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta : APMD Press, 2003), hlm. 50

<sup>10</sup> Patrick Spread. "Blau's Exchange Theory, Support and the Macrostructure." *The British Journal of Sociology*, Vol. 35, No. 2 (1984), hlm.162. Diakses dari <http://www.jstor.org/>

stable/590230, diakses pada 12 Februari 2013.

<sup>11</sup> James Scott. hlm. 92. <http://www.jstor.org/stable/1959280>, diakses pada 30 November 2014.

tidak mengikat) antara atasan (patron atau pemimpin) dengan sejumlah bawahan (klien, pelayan, atau pengikut), berdasarkan pertukaran pelayanan yang asimetris, di mana secara *de facto* patron tergantung kepada para klien yang memberi pelayanan cuma-cuma yang bisa mencakup kewajiban secara ekonomis, tugas-tugas dengan upah atau tidak, menjadi prajurit perang, dukungan politik dan pelayanan lainnya, diimbangi dengan peran patron untuk menjadi figure pemimpin bagi semua klien dan pemberian bantuan, termasuk pinjaman uang dan perlindungan.<sup>12</sup>

Namun, bila dicermati dalam relasi patron-klien, sulit untuk menentukan siapa yang paling diuntungkan atas pertukaran-pertukaran tersebut, sebab bisa saja hal tersebut berlangsung secara seimbang. Patron menyediakan kebaikan, pekerjaan, perlindungan, atau bahkan jabatan, sedangkan klien menawarkan penghormatan dan dukungan politik. Sehingga jika dicermati hubungan semacam ini akan terasa sulit membedakan “siapa yang memanfaatkan siapa” sebab sebenarnya masing-masing pihak mendapatkan sesuatu yang diharapkannya.<sup>13</sup>

Terkait dengan cara dalam membangun jaringan patron-klien serta pertukaran sumber daya antara patron dengan kliennya, Scott mengklasifikasikannya sebagai berikut<sup>14</sup>:

1. **Sarana dasar subsistensi.** Jasa utama yang diberikan oleh patron dapat berupa pekerjaan tetap, jabatan-jabatan di pemerintahan desa atau organisasi desa.
2. **Jaminan krisis subsistensi.** Umumnya, patron diharapkan memberikan pinjaman pada saat bencana ekonomi, membantu menghadapi krisis, atau membantu pada saat usaha klien dalam keadaan bangkrut. Jadi, patron diharapkan memberikan jaminan “dasar” subsistensi bagi kliennya dengan

<sup>12</sup> Pelras, *Op.Cit.*, hlm. 2-3.

<sup>13</sup> Yahya Muhaimin. “Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia”. Dalam Ahmad Zaini Abar (ed). *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru: Esei-Esei dari Fisipol Bulaksumur*, (Surakarta: CV. Ramadhani, 1990), hlm. 25.

<sup>14</sup> James C. Scott.. “*The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia.*” *The Journal of Asian Studies*, Vol. 32, No. 1, (1972b), hlm. 9. <http://www.jstor.org/stable/2053176>, diakses pada 23 November 2014.

menyerap kerugian-kerugian (dalam usaha atau pekerjaan) yang dapat merugikan kehidupan klien jika tidak dilakukan oleh patron.

3. **Perlindungan.** Perlindungan ini berarti melindungi klien dari gangguan atau tekanan dari pihak lain. Gangguan atau tekanan bisa saja datang dari musuh pribadi maupun dari pemerintah melalui tentara, pejabat, pengadilan, maupun pemungut pajak). Gangguan atau tekanan tersebut tidak hanya yang mengancam pribadi dan keluarga klien saja, namun mencakup juga ancaman terhadap usaha atau pekerjaannya.
4. **Perantara dan pengaruh.** Jika patron melindungi kliennya dari perusakan atau intimidasi yang datang dari luar, ia juga menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk menarik hadiah dari luar untuk kepentingan kliennya. Perlindungan merupakan peran defensive patron dalam menghadapi dunia luar; keperantaraan adalah peran agresifnya.
5. **Pelayanan kolektif patron.** Secara internal, patron sebagai kelompok dapat melakukan fungsi ekonomi kolektif. Mereka bisa mengelola dan memberikan bantuan berupa subsidi untuk badan amal setempat, menyumbangkan tanah untuk kepentingan komunal, mendukung pelayanan public lokal dan sebagainya.

Arus barang dan jasa dari klien ke patron, menurut Scott pada umumnya sangat sulit untuk memetakan karakternya karena seorang klien umumnya menyediakan tenaga dan keahliannya untuk kepentingan patron apa pun bentuknya, termasuk melayani sebagai anggota setia dari faksi patron lokal. Bagi klien, unsur kunci dari evaluasi ialah perbandingan antara jasa yang diterimanya dengan yang diberikannya. Makin besar nilai yang diterimanya dari patron dibanding biaya yang harus ia kembalikan, maka makin besar kemungkinannya ia melihat ikatan ini sebagai sah.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> *ibid*, hlm. 9-10

## Relasi antara Foke-Nara dengan Forkabi

### a. *Sumber Daya yang Dipertukarkan*

Salah satu ciri hubungan patron klien adalah adanya suatu ketimpangan dalam pertukaran. Pada kasus pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 yaitu antara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), pertukaran sumber daya juga terasa hadir diantara hubungan keduanya. Merujuk pada 5 hal arus patron ke klien yang dipaparkan oleh James Scott, maka konteks penelitian pola relasi antara Foke-Nara dan Forkabi akan lebih banyak berkuat pada pembahasan ekonomi dan politik, serta pengaruhnya secara sosial seperti berikut:

1. **Sarana Dasar Subsistensi**, adalah jasa utama yang diberikan oleh patron. Kesamaan organisasi menjadi *point* utama dari pola hubungan antara Foke-Nara dan Forkabi. Maka, jasa pertukaran utamanya adalah berupa uang yang dikeluarkan oleh Foke-Nara sebagai donatur tetap juga pembina dalam organisasi masyarakat Forkabi, yang mana uang donatur tersebut diharapkan mampu menghidupi dan mendukung segala kegiatan dari organisasi masyarakat Forkabi, yang mana uang donatur tersebut diharapkan mampu menghidupi dan mendukung segala kegiatan dari organisasi masyarakat Forkabi. Selain uang, sarana dasar subsistensinya adalah iming-iming atau janji-janji akan diberikan jabatan di pemerintahan daerah khusus Ibukota Jakarta, jika Forkabi mau mendukung Foke-Nara. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum Forkabi, Husein Sani, pada tanggal 15 Januari 2015 bahwa Foke adalah mantan ketua umum BAMUS Betawi, sehingga beliau pasti sudah mengetahui tentang ormas Betawi, oleh karena itu para anggota Forkabi meminta tolong agar beliau bersedia menjadi pembina.<sup>16</sup> Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan yang dilontarkan oleh salah satu pembina organisasi masyarakat Forkabi DPRt Kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan H. Safei Karib

pada tanggal 12 Februari 2015 bahwa Foke mengatakan akan terus bekerjasama dalam membenahi DKI Jakarta agar lebih baik. Kalimat tersebut menyiratkan bahwa akan ada dari anggota Forkabi yang akan masuk ke dalam pemerintahan karena banyak dari anggota Forkabi yang berpotensi untuk masuk kedalam pemerintahan.<sup>17</sup>

2. **Jaminan krisis subsistensi**, sering kali Foke dengan mudah memberikan pinjaman ataupun sumbangan sukarela apabila terjadi sebuah musibah yang menimpa anggota Forkabi ataupun masalah terhadap organisasinya tersebut dan hal ini biasanya menyangkut rasa sosial, misalnya seperti sakit atau kecelakaan yang terjadi kepada para anggota Forkabi. Ini lebih kepada kepekaan sosial untuk dapat membantu kehidupan kliennya dan ini dapat sangat terlihat dalam pola hubungan Foke-Nara dan Forkabi, terutama dengan anggota yang sangat dikenalnya. Seperti yang dikatakan kembali oleh H. Safei Karib bahwa Foke memang suka membantu siapapun, termasuk jika ada anggota yang sedang mengalami kesulitan misalnya ada yang mengalami kecelakaan dan Foke datang untuk menjenguknya.<sup>18</sup> Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh anggota Forkabi Pusat sekaligus anggota Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) Forkabi Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan bahwa selain cerdas, Foke agamanya juga bagus dan sering membantu sesama dan yang paling penting beliau sangat cinta dengan Betawi.<sup>19</sup>
3. **Perlindungan**, perlindungan ini berarti melindungi klien dari gangguan atau tekanan dari pihak lain. Foke sebagai pembina Forkabi pusat dan Nara sebagai Ketua Umum BAMUS Betawi, selalu totalitas dalam melindungi organisasi masyarakat mereka masing-masing agar tetap terus eksis dan dikenal oleh masyarakat luas. Tidak jarang banyak oknum yang ingin

<sup>16</sup> Dina Fadiyah. "Pola Patron-Klien Foke-Nara dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012 di Kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan". (Tesis. Pascasarjana UGM Yogyakarta, 2015), hlm. 71.

<sup>17</sup> *ibid*

<sup>18</sup> *ibid*, hlm. 72

<sup>19</sup> *ibid*

menjatuhkan organisasi masyarakat Betawi, misalnya seperti pernah beberapa kali posko Forkabi diserang, tetapi para anggota Forkabi tidak pernah meladeni, karena Forkabi adalah organisasi masyarakat yang sesungguhnya, bukan organisasi preman yang menggunakan *kedok* sebagai organisasi masyarakat.

Bapak Yayasan Hidayat dalam wawancaranya mengatakan bahwa Foke mengetahui Forkabi bukanlah organisasi yang suka membuat onar oleh karena itu Forkabi selalu aman.<sup>20</sup> Meskipun Pak Yayasan orang Betawi, beliau tidak munafik kalau di luar sana memang banyak organisasi masyarakat Betawi yang arogan dan *brutal*, itu karena tujuan utama mereka bukan untuk memajukan Betawi tapi mencari keuntungan, kalau para anggota Forkabi tidak menjadikan Forkabi sebagai lahan mata pencaharian. Forkabi adalah tempat masyarakat untuk mengembangkan cita-cita yaitu membuat Betawi bangkit lagi.<sup>21</sup>

- 4. Pengaruh**, dalam hal ini Foke-Nara sebagai patron mampu memberikan pengaruh agar Forkabi beserta anggotanya tetap konsisten dalam memberikan dukungan kepadanya dengan memberikan iming-iming atau janji-janji kepada Forkabi beserta anggotanya. Pengaruh disini hanya sebatas untuk proteksi (perlindungan) menjaga agar Forkabi dan anggotanya tidak berpindah dukungan kepada kandidat lain, contoh singkatnya dengan memberikan kata-kata seperti ini, “*emangnya mau Jakarta dipegang bukan sama orang Betawi?*” Sebagai Betawi, memang harus melestarikan kebudayaan Betawi meskipun sekarang orang Betawi mayoritas sudah digusur ke beberapa daerah seperti, Depok, Tangerang, Bekasi, Citayam, Bojong, dsb. Pembina Forkabi yaitu Foke, selalu mengingatkan untuk tetap maju dan tidak kalah dengan pendatang yang semakin banyak. Bagaimanapun, Jakarta punya orang Betawi, bukan pendatang.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *ibid*, hlm. 73

<sup>21</sup> *ibid*, hlm. 73-74

<sup>22</sup> *ibid*

- 5. Jasa kolektif patron**, secara internal, patron sebagai kelompok dapat melakukan fungsi ekonomi kolektif. Mereka bisa mengelola dan memberikan bantuan berupa subsidi untuk badan amal setempat, menyumbangkan tanah untuk kepentingan komunal, mendukung pelayanan publik lokal dan sebagainya. Dalam kasus Foke-Nara dan Forkabi, Foke-Nara diibaratkan sebagai sosok yang mampu memberikan fungsi ekonomi kolektif bagi para anggota Forkabi, dalam artian bahwa patron dapat menyumbangkan kelebihan ekonominya untuk kegunaan kolektif kemasyarakatan. Mereka bisa memajukan kepentingan masyarakat dengan mensponsori berbagai kegiatan atau ikut aktif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Forkabi. Dokter Sibroh Malisi selaku salah satu anggota Forkabi DPRt Jagakarsa, Jakarta Selatan menuturkan bahwa Foke selalu menyempatkan diri untuk hadir ke dalam setiap acara yang diadakan oleh Forkabi dan Foke-Nara adalah dua putera Betawi yang mempunyai visi untuk memajukan kebudayaan Betawi.<sup>23</sup>

Dari arus pertukaran sumber daya oleh patron ke klien diatas terlihat jelas bahwa sumber daya yang diberikan oleh Foke-Nara kepada Forkabi, tidak hanya materi yang diberikan, namun juga perilaku pribadi yang baik, yang mereka tunjukkan kepada Forkabi. *Attitude* kandidat menjadi sangat penting agar si klien atau Forkabi, tetap konsisten dalam memajukan Foke-Nara sebagai kandidat calon Gubernur DKI Jakarta 2012.

Selain itu, dalam menjalin relasi sosial patron klien, tidak bisa jika patron hanya memberikan materi kepada si klien, tanpa diimbangi dengan pola tingkah laku yang baik, karena itu menjadi salah satu kunci penting agar hubungan tersebut dapat bertahan lama. Klien bisa saja memutuskan hubungan tersebut kapan saja jika ada perilaku si patron yang tidak berkenan ataupun pertukaran sumber daya yang sudah tidak lagi dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam hubungan patron klien, *attitude* patron menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hubungan tersebut.

---

<sup>23</sup> *ibid*, hlm. 79-80

Arus barang dan jasa dari klien ke patron amat sukar untuk digolongkan, sebagai “orangnya” patron, maka klien akan menyediakan tenaga dan keahliannya untuk kepentingan patron apapun bentuknya. Dalam penelitian James Scott pada masyarakat petani dan tuan tanah, maka arus klien ke patron bisa mencakup banyak hal, yang paling utama adalah pekerjaan pertanian, lalu bisa ditambahkan dengan jasa tambahan lainnya seperti pemberian makanan sebagai rasa penghormatan hingga dapat menjadi anggota setia dari tindakan politik patron.

Namun, untuk konteks hubungan sosial antara Foke-Nara dan Forkabi, maka arus barang dan jasa yang diberikan adalah :

**1. Dukungan (tenaga dan waktu),** Forkabi tidak hanya bersedia menjadi tim sukses dari Foke-Nara, bahkan Forkabi sangat loyal terhadap Foke-Nara. Pada awal Forkabi diminta untuk menjadi tim sukses dari Foke-Nara, para anggota Forkabi sama sekali tidak memikirkan apa yang mereka dapatkan. Tidak ada alasan yang membuat Forkabi untuk menolak tawaran yang dilakukan oleh Foke-Nara. Justru dengan adanya tawaran tersebut, membuat Forkabi merasa senang karena mereka bisa memanfaatkan ajang ini untuk membalas segala kebaikan dari Foke-Nara selama ini. Dalam melakukan kampanye, Forkabi sangat totalitas dalam mengeluarkan tenaga, waktu dan pikiran untuk Foke-Nara, karena sistem kampanye yang mereka lakukan adalah sistem *door-to-door*, jadi tidak heran jika tenaga dan waktu mereka sangat habis dalam sistem ini.

Para anggota Forkabi tidak merasa bermasalah jika tenaga dan waktu mereka habis untuk kampanye mendukung Foke-Nara karena jika mereka menang, itu merupakan suatu kemenangan untuk Betawi.<sup>24</sup>

**2. Suara,** para anggota Forkabi akan melakukan apapun demi tercapainya tujuan mereka yaitu meraih suara pemilih sebanyak-banyaknya untuk pasangan calon Gubernur Foke-Nara. Forkabi berhasil menyatukan

suara mereka dalam pemilihan Gubernur untuk Foke-Nara. Ini disahkan oleh Ketua Umum Forkabi Pusat yaitu Murdhani, jadi para anggota tidak satupun yang boleh melanggar aturan tersebut. Dukungan ini dicetuskan melalui Rapat kerja (RAKER) antara Dewan Kehormatan Forkabi, anggota dan kader Forkabi di 6 (enam) DPD. Dalam Raker Forkabi tersebut, membahas tentang dukungan dan cara untuk mensukseskan pasangan calon Gubernur DKI Jakarta 2012 yaitu Foke-Nara.<sup>25</sup>

Selain dukungan dan suara yang diberikan oleh Forkabi kepada Foke-Nara, tidak sedikit anggota Forkabi yang justru malah membantu Foke-Nara dalam kampanye tersebut, seperti mereka mengumpulkan uang sendiri untuk membantu Foke-Nara dalam berkampanye. Uang itu dapat digunakan untuk membeli keperluan kampanye seperti kaos dan *sticker*<sup>26</sup>.

#### ***b. Pola Patron Klien antara Foke-Nara dan Forkabi***

James Scott mengatakan bahwa hubungan patron klien merupakan hubungan spesial antara dua pihak dimana pihak yang memiliki status ekonomi politik yang lebih tinggi menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk melindungi dan memberikan manfaat pada pihak yang statusnya lebih rendah. Dalam hubungan seperti ini, imbalan yang diberikan klien dalam bentuk bantuan atau dukungan termasuk “pelayanan” kepada patron. Gejala patron klien dalam kehidupan ekonomi terjadi karena klien mendapatkan kemudahan-kemudahan dari patron.

Dalam sebuah hubungan patron klien, terdapat satu hal penting yaitu adanya unsur pertukaran barang atau jasa bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pola hubungan ini. Pemahaman dari hubungan patron klien adalah sebuah pertukaran, dengan asumsi dasar pertukaran yang terjadi dalam sebuah hubungan sosial ini menciptakan keuntungan-keuntungan yang

<sup>24</sup> *ibid*, hlm. 78

<sup>25</sup> *ibid*, hlm. 79

<sup>26</sup> *ibid*, hlm. 80

diperoleh kedua belah pihak, yaitu Foke-Nara sebagai patron dan Forkabi sebagai klien.

Untuk kasus antara Foke-Nara dan Forkabi, patron klien adalah salah satu bentuk dari pertukaran yang mengikat pola kekuasaan dalam kehidupan sosial manusia. Bentuk dari adanya pertukaran ini diciptakan melalui mekanisme interaksi langsung antara Foke-Nara dan Forkabi dan kemudian memunculkan sebuah komunikasi langsung yang berorientasi pada capaian-capaian yang bersifat ekstrinsik (yaitu uang) dan juga intrinsik (yaitu respek hormat, pengaruh, kuasa dan jabatan politik). dengan adanya orientasi pada tujuan-tujuan tersebut, maka interaksi antara Foke-Nara dan Forkabi tercipta melalui sebuah kontak langsung, ada saling tatap muka diantara keduanya, interaksi sosial seperti ini menggambarkan adanya rasa respek, saling menghormati diantara mereka untuk mencapai sebuah kesepakatan yang serius untuk tujuan akhir mendapatkan kebutuhan yang sifatnya juga sangat penting.

Patron klien sendiri merupakan interaksi sosial yang berasal dari hubungan vertical. Satu aktor memiliki peran yang lebih superior dibandingkan aktor yang lain. Aktor yang superior ini kemudian memberikan bantuan yang diperlukan kepada aktor yang lebih inferior, sehingga secara norma aktor inferior tersebut merasa harus membalas kebaikan aktor yang kedudukannya lebih tinggi tersebut. Oleh karena itu, relasi patron klien sering juga disebut pertukaran antara aktor superior dengan aktor inferior.



Patron klien dicerminkan sebagai interaksi sosial yang berasal dari hubungan vertical dengan aktor yang berperan sebagai patron,

memiliki peran yang lebih superior dibandingkan aktor yang ada di bawahnya. Foke-Nara sebagai patron menawarkan kebutuhan ekonomi berupa bantuan atau donatur terhadap organisasi masyarakat Forkabi.<sup>27</sup>

Selain menjadi pembina, Foke-Nara juga menjadi donatur tetap dalam tubuh Forkabi sejak awal Forkabi didirikan. Posisi beliau sebagai pembina dan donatur, semakin gencar saat menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Hal tersebut dapat membuatnya lebih superior terhadap para anggota Forkabi. Beliau juga menganjurkan untuk mengadakan Festival yang sama di setiap Kecamatan dan Kelurahan di DKI Jakarta setiap tahunnya. Foke juga ikut membantu pengembangan daerah kebudayaan Betawi di wilayah Jagakarsa yang dinamakan “Kampung Betawi Setu Babakan”. Masyarakat asli Jakarta atau Betawi sangat menyambut baik hal tersebut karena program itu tidak pernah disugui oleh Gubernur-Gubernur DKI Jakarta sebelumnya serta karena posisi masyarakat Betawi itu sendiri semakin hari semakin terpinggirkan. Dengan pola seperti ini, Foke-Nara juga dapat menekan organisasi masyarakat Forkabi untuk mendukung atau memberikan suara dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> *ibid*, hlm. 94

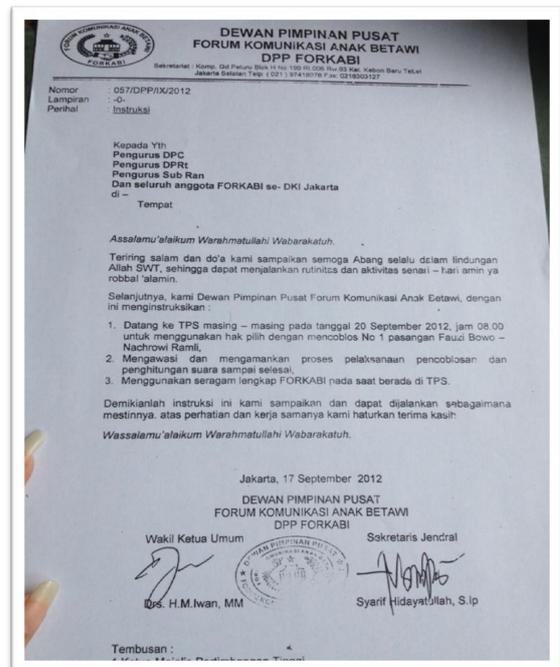
<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 95



Gambar 1. Foto Perkembangan Budaya Betawi Setu Babakan di Kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan

Sumber: dokumentasi penulis

Para pengurus serta anggota dari organisasi masyarakat Forkabi yang selama ini sudah mendapat pembinaan, sponsor dan donasi oleh Foke-Nara secara otomatis memiliki sebuah kewajiban untuk membalas “kebaikan” dari apa yang disediakan oleh Foke-Nara sebagai patron. Hampir dari semua pengurus dan anggota Forkabi yang telah menerima segala bantuan dalam bentuk materi maupun non-materi mengakui bahwa secara tidak langsung mereka memiliki utang budi kepada Foke-Nara. Para anggota Forkabi banyak yang menjadi relawan, baik itu sebagai tim sukses termasuk tim pemantau pemenangan Foke-Nara maupun saksi pada saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Menurut mereka, apa yang mereka lakukan adalah bukan karena mengharapkan imbalan tetapi lebih kepada loyalitas mereka sebagai anggota ormas yang selama ini dibina oleh Foke-Nara. Mereka merasa bahwa mereka wajib membantu sekuat tenaga pada saat Foke maupun Nara membutuhkan bantuan mereka.



Gambar 2. Foto bukti instruksi yang dikeluarkan oleh Forkabi pusat untuk mendukung atau mencoblos Foke-Nara

Sumber: dokumentasi penulis

Kedua aktor baik Foke-Nara maupun Forkabi memiliki hubungan saling ketergantungan, kebutuhan satu sama lain yang saling menguntungkan. Penggambaran dua arah panah berlawanan seperti diatas lebih memiliki makna bahwa patron-klien sebagai sebuah aksi timbal balik, Foke-Nara memberikan apa yang dibutuhkan oleh Forkabi dan Forkabi memberikan dukungan dan suara kepada Foke-Nara.

Merujuk pada teori patron-klien, relasi sosial yang terjadi diantara Foke-Nara dan Forkabi adalah cerminan dari teori tersebut. Sebuah “pelayanan” dari seorang patron dapat diartikan sebagai donatur tetap yang dimiliki patron dan diinginkan oleh klien yang dalam hal ini adalah Forkabi. Dalam studi lapangan yang berhasil dihimpun juga mengungkapkan hal yang sama, yaitu Foke-Nara adalah aktor yang dibutuhkan dalam memajukan organisasi Forkabi dan kebudayaan etnis Betawi itu sendiri. Foke-Nara memang bukan seorang aktor yang hanya memiliki sumber daya sebagai donatur di dalam Forkabi, tetapi kecerdasan, ketegasan dan agama Foke-Nara lah yang juga sangat dilihat oleh para anggota Forkabi. Ada kandidat lain di luar sana yang mungkin menyajikan program serta visi misi yang lebih baik, namun Forkabi tetap merasa bahwa etnis Betawi-lah yang paling pantas untuk memegang DKI 1 karena etnis Betawilah yang merupakan penduduk asli dari DKI Jakarta.

Foke-Nara telah menjadi sosok patron karena memiliki wewenang khusus dalam membantu menanggulangi problem ekonomi maupun sosial Forkabi (klien), melihat artian ini maka jika dihubungkan dengan keberlangsungan kehidupan dari organisasi Forkabi itu sendiri, Foke-Nara adalah sosok patron yang sangat dibutuhkan oleh para anggota Forkabi demi menjaga eksistensi organisasi Forkabi dan kebudayaan Betawi itu sendiri. Foke-Nara menjadi pelaku yang siap membantu para anggota Forkabi dan menjadikannya sebagai klien. Mengapa Foke-Nara dapat menjadi patron dalam hubungan sosial ini? Karena relasi yang terjadi diantara mereka adalah sebuah relasi yang tercipta karena kebutuhan akan sumber. Sumber atau nilai yang dimiliki oleh Foke-Nara merupakan suatu kebutuhan yang sangat dicari oleh para anggota Forkabi, Foke-Nara sebagai

patron memiliki daya untuk mengakses ekonomi sang klien.

Sebagai sebuah pola hubungan pertukaran, maka hubungan patron klien menciptakan sebuah ikatan kuat dimana Foke-Nara tidak mungkin untuk terus menjalankan pekerjaannya tanpa keberadaan dari para anggota Forkabi. Fakta utamanya adalah para anggota Forkabi ini memiliki andil sebagai sumber dukungan bagi Foke-Nara. Fakta ini menggambarkan sebuah pola relasi dua arah yang saling berlawanan, karena disamping Foke-Nara terlihat superior dengan mempunyai hak untuk memberikan/ tidak bantuan terhadap Forkabi, namun mereka juga memiliki sebuah kebutuhan yaitu kebutuhan dukungan dan suara pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Idealnya adalah apabila Foke-Nara sudah dianggap tidak relevan dengan menarik bantuan atau mengurangi segala bantuannya terhadap Forkabi, maka Forkabi juga berhak untuk menarik atau memberhentikan dukungannya terhadap Foke-Nara.

Foke-Nara yang bergerak sebagai patron jelas memiliki sebuah relasi timbal balik dengan para anggota Forkabi, membuat mereka untuk lebih berhati-hati dan memiliki keharusan untuk menjaga perasaan dari para anggota Forkabi. Relasi antara Foke-Nara dan Forkabi semakin meyakinkan bahwa relasi tersebut adalah patron klien, ketika peneliti menemukan bahwa pada saat tahun 2007 dimana pada saat itu untuk pertama kalinya DKI Jakarta mengadakan Pilkada secara langsung, Foke yang pada saat itu berpasangan dengan Prijanto, sudah merekrut Forkabi sebagai tim suksesnya. Jadi, sejak kontestasi politik tahun 2007, Foke dan Forkabi sudah menjalin kerjasama yang luar biasa hebatnya, karena pada saat itu Forkabi sukses memenangkan Foke-Prijanto untuk menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta.

Analisis tentang pola relasi patron klien yang ada antara Foke-Nara dan Forkabi memang belum pernah dijelaskan pada penelitian lainnya, dengan mencoba untuk menganalisis lebih jauh, maka pembahasan akan coba melihat kembali kepada pemikiran James Scott tentang pola patron klien. Ide pemikiran akan pola hubungan patron klien oleh James Scott bersumber dari bukunya tentang Moral Petani, Perlawanan Kaum Tani,

Senjatanya Orang-Orang Kalah dan yang lainnya. James Scott mengibaratkan sebuah hubungan yang terjadi kepada kasus petani dengan pemilik tanah, singkatnya antara pemilik dengan penyewa (yaitu petani penggarap lahan). Relasi patron klien diasumsikan sebagai ikatan dari sebuah pertukaran hubungan antara dua peran aktor yang berbeda, dimana seorang individu yang mempunyai status sosio-ekonomi yang lebih tinggi (sebagai patron) dapat menggunakan pengaruh dan sumber daya untuk menyediakan jaminan sosial yang dibutuhkan individu lainnya dimana individu ini juga mengharap untuk mendapatkan keuntungan atas kebutuhan yang diberikan oleh patron. Sebagai hubungan sosial dengan adanya pola pertukaran, maka barang jasa/kebutuhan yang saling diberikan oleh patron maupun klien harus mencerminkan kebutuhan dan sumber daya dari masing-masing pihak yang dalam kasus James Scott adalah lahan dan garapan.

Melihat pada hubungan patron klien antara Foke-Nara dan Forkabi, maka apa yang menjadi jenis pertukarannya adalah uang, janji untuk dapat memajukan etnis dan dapat mengembangkan kebudayaan Betawi serta dukungan suara. Uang adalah sumber dari dasar pemenuhan kehidupan ekonomi, para anggota Forkabi sangat membutuhkannya untuk menggerakkan organisasinya dan uang adalah sebuah simbol dari alat kekuasaan yang mutlak. Hal ini menyebabkan bagaimana Foke-Nara sebagai penyedia sumber bantuan (uang) memberikan pengaruh terhadap Forkabi. Janji untuk dapat memajukan etnis serta dapat mengembangkan kebudayaan Betawi, juga cukup menjanjikan untuk dijadikan sebagai alat tukar dalam pola relasi tersebut. Uang serta janji untuk dapat memajukan etnis Betawi, masing-masing memiliki nilai dan potensi yang kuat untuk mengikat dan mempertahankan pola relasi antara Foke-Nara dan Forkabi.

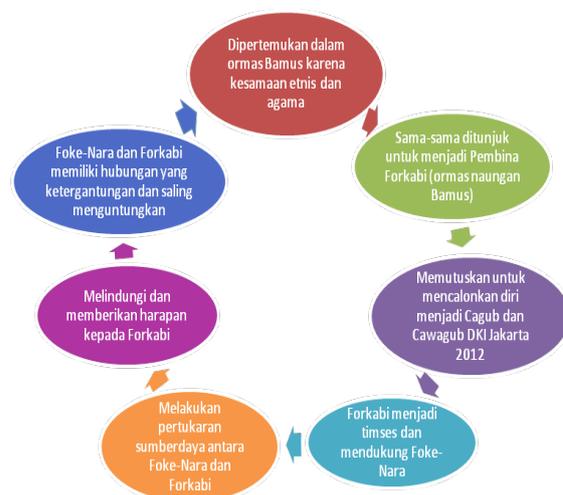
Secara garis besar, apa yang dilihat dari perumpamaan dua gambar pola hubungan diatas, telah memperlihatkan hubungan dua arah antara Foke-Nara (patron) dengan Forkabi (klien) yang saling terikat karena pertukaran kebutuhan, namun diantara keduanya tetap mempunyai posisi tawar yang berbeda. Relasi yang berjalan diantara keduanya juga memuat

unsur ketidakseimbangan yang bisa membuat hubungan patron klien diantara pelaku yaitu Foke-Nara dan Forkabi menjadi lentur.

## Penutup

Kontestasi politik yang terjadi di DKI Jakarta pada tahun 2012 yaitu ketika pemilihan Gubernur, sangatlah menuai polemik. Dalam kompetisi pilkada langsung ini terjadi persaingan sengit di kalangan bakal calon, khususnya untuk memenangkan suara rakyat menggunakan manuver-manuver politik. Manuver politik inilah yang dijadikan alat untuk mengembangkan isu-isu serta wacana tentang calon kepala daerah, baik mengenai hal yang positif (pencitraan), maupun wacana yang bersifat negative (*black campaign*).

Manuver-manuver politik tersebut sangat dimanfaatkan oleh pasangan bakal calon Foke-Nara, dimana pada saat itu Foke-Nara menggandeng Forkabi sebagai tim suksesnya karena ingin kemenangan pada tahun 2007 terulang kembali berkat dukungan dari Forkabi. Hubungan antara Foke-Nara dan Forkabi dapat dikatakan sebagai hubungan patron klien dengan pola seperti berikut :



Pola yang dihadirkan oleh Foke-Nara dan Forkabi seperti pada gambar di atas adalah pola patron klien yang terjadi dikarenakan adanya pertukaran sumber daya yang menjadi point utama dalam hubungan patron klien. Foke-Nara dan Forkabi sudah memperlihatkan jelas adanya

sebuah transaksi dari segi ekonomi, politik dan pengaruhnya terhadap dimensi sosial. Foke-Nara dan Forkabi mempunyai sumber daya dan daya tawar yang berbeda sehingga keduanya saling membutuhkan satu sama lain, artinya pertukaran tersebut terjadi ketika keduanya dapat menerima sumber daya yang dimiliki masing-masing.

Adapun arus pertukaran sumber daya dari patron ke klien untuk mengupayakan kebaikan diantara mereka seperti sarana dasar subsistensi yaitu pemberian sumber daya berupa uang donatur yang dijadikan sebagai alat penghidupan ormas Forkabi, lalu jaminan krisis subsistensi yang menyangkut hal-hal sosial kemanusiaan seperti pertolongan atau bantuan pada saat anggota Forkabi mengalami kesusahan atau terkena musibah, kemudian adalah jasa kolektif patron seperti menyumbang untuk acara-acara di kampung kelurahan Jagakarsa, Jakarsa Selatan dan yang terakhir adalah perlindungan dan pengaruh dimana Foke-Nara sebagai patron mampu melindungi Forkabi dari ancaman luar di Jakarta serta Foke-Nara juga mampu mempengaruhi agar Forkabi tetap konsisten dalam mendukung Foke-Nara dalam pilkada DKI Jakarta 2012. Selain ada lima arus pertukaran sumberdaya yang penulis adopsi dari teori James Scott, penulis juga menemukan arus pertukaran sumberdaya yang tergetnya adalah pribadi dan dikenal dengan istilah *unconditional partisan bias* di dalam pola patron klien antara Foke-Nara dan Forkabi.

Pola patron klien memungkinkan untuk dapat melihat hubungan Foke-Nara dan Forkabi dalam dimensi kehidupan yang lebih luas seperti dimensi sosial, ekonomi dan politik. Ketiga dimensi tersebut merupakan unsur utama dimana pola pertukaran sumberdaya dari patron ke klien dapat terlihat secara gamblang. Uang menjadi sumber utama dari adanya pola hubungan ini tetapi unsur etnisitas juga membantu menguatkan pola hubungan tersebut. Foke-Nara memiliki sumberdaya utama dalam ikatan patronase, ini menjadikan Foke-Nara untuk memiliki power yang lebih kuat dan digunakannya untuk mengatur sendiri aturan main dengan Forkabi. Para anggota Forkabi yang lebih inferior dalam urusan ini akan dengan legowo mengikuti perintah dari atasannya yaitu para petinggi di

ormas Forkabi yang tentunya diamanatkan oleh Foke-Nara.

Argumen utama disini adalah bahwa pola patron klien antara Foke-Nara dan Forkabi, tidak hanya dibangun berdasarkan persahabatan instrumental seperti apa yang dikatakan oleh Scott, melainkan ada unsur lain yaitu kesamaan etnis dan agama serta. Selain itu, pola patron klien antara Foke-Nara dan Forkabi, tidak hanya politik distributive yang muncul karena adanya program-program yang ditawarkan, melainkan hadir juga politik transaksional dimana janji atau iming-iming menduduki jabatan pemerintahan hadir. Sehingga, pola patron klien disini adalah perpaduan antara politik distributive dan politik transaksional.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Hefni, Moh. *Patron-client Relationship pada Masyarakat Madura*. Jurnal KARSA. Vol. XV No. 1. 2009.
- Muhaimin, Yahya. "Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia", dalam Ahmad Zaini Abar (ed). *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru: Esei-esei dari Fisipol Bulaksumur*. Surakarta: CV. Ramadhani. 1990.
- Pelras, Christian. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar. 2006.
- Scott, James. "Perlawanan Kaum Tani". Diterjemahkan oleh Budi Kusworo, et al, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1993.
- Sutoro, Eko. *Transisi Demokrasi Indonesia*". Yogyakarta : APMD Press. 2003.

### Jurnal

- Lande, Carl H. "Leaders, Factions, and Parties: The Structure of Philippine Politics." *Journal of Southeast Asian History*. Vol. 7. No. 2. 1966.
- Rutinsyah. *Hubungan Patron-Klien Sebagai Strategi Pengembangan Ternak Sapi Perah di Perdesaan: Studi Kasus Peternak Sapi Perah di Desa Telogosari, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur*. Mozaik: Jurnal Ilmu Humaniora. Vol.12. No.2. 2012.
- Scott, James C. "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia." *The American Political Science Review*, Vol. 66, No. 1. 1972a.
- Scott, James C. "The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia". *The Journal of Asian Studies*, Vol. 32, No. 1. 1972b.

Spread, Patrick. "Blau's Exchange Theory, Support and the Macrostructure". *The British Journal of Sociology*, Vol. 35, No. 2. 1984.

### **Tesis**

Fadiyah, Dina. *Pola Patron-Klien Foke-Nara dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012 di Kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan*. Tesis. Pascasarjana UGM Yogyakarta. 2015.

## TENTANG PENULIS

### **Aisah Putri Budiatri**

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjana di Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal, buku dan dipresentasikan di dalam konferensi nasional dan internasional. Beberapa judul artikel yang telah diterbitkan diantaranya berjudul: “Pengawasan DPR RI 1999-2004: Mewakili Partai, Mengabaikan Rakyat?”, “Representasi Perempuan dalam Pusaran Politik Papua,” “Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI dan DPRD),” dan beberapa artikel lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui [aisahputrib@gmail.com](mailto:aisahputrib@gmail.com).

### **Wasisto Raharjo Jati**

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pada tahun 2012, ia menamatkan kuliah (S-1) di Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah nasional dan Aktif menulis kolom opini juga di berbagai macam media massa, baik lokal maupun nasional. Ia menekuni studi tentang Politik Kelas, Kelas Menengah, Ekonomi-Politik, dan Gerakan Politik. Penulis dapat dihubungi melalui email: [wasisto.raharjo.jati@gmail.com](mailto:wasisto.raharjo.jati@gmail.com)

### **Dina Fadiyah**

Penulis adalah staf pengajar di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Telah menyelesaikan S2 Ilmu Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada. Email: [dinafadiyah@hotmail.com](mailto:dinafadiyah@hotmail.com)

### **Septi Satriani**

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Lokal, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia memperoleh Gelar Sarjana dari Ilmu Politik Universitas Gajah Mada pada tahun 1999 dan Gelar Master dari Ilmu Antropoloti Universitas Gajah Mada pada tahun 2015. Ia menekuni studi politik lokal, politik sumber daya alam, dan studi konflik. Penulis dapat dihubungi melalui: [septisatriani@gmail.com](mailto:septisatriani@gmail.com).

### **Siswanto**

Penulis kelahiran Jakarta ini menamatkan S1 pada Fakultas Sospol jurusan Hubungan Internasional Universitas Jayabaya Jakarta pada tahun 1986. Selanjutnya mengikuti Program Magister pada Program Studi Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, dan lulus tahun 1997. Gelar doctor diraih pada Fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Ilmu Sejarah, Universitas Indonesia, pada tahun 2008. Sejak 1999 menjadi peneliti P2P-LIPI untuk menjabat Kepala Bidang Perkembangan Eropa. Sebagian besar karya ilmiah dan tulisannya membahas tentang kebijakan luar negeri AS dan hubungan Indonesia-AS. Sejak tahun 2008 sampai sekarang menjadi dosen tamu pada Program Studi Kajian Wilayah Amerika, Universitas Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui [sish\\_jakarta@yahoo.com](mailto:sish_jakarta@yahoo.com).

### **Sandy Nur Ikfal Raharjo**

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Internasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. S1 ilmu Hubungan Internasional diselesaikan di FISIP Universitas Indonesia. Gelar S2 diperoleh dari Universitas Pertahanan dengan tema Resolusi Konflik. Ia menekuni studi-studi pembangunan wilayah perbatasan, sengketa dan konflik perbatasan, serta isu-isu stabilitas keamanan regional. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: [sandy.raharjo@gmail.com](mailto:sandy.raharjo@gmail.com).

### **Anggi Afriansyah**

Lahir di Bekasi, 17 April 1987. Setelah menyelesaikan studi sarjana di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta (2010), ia kemudian melanjutkan studi di Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia (2014). Pernah menjadi guru di SMAI Al Izhar, Pengajar di Universitas Negeri Jakarta, Universitas Terbuka, Akademi Kebidanan Prima Indonesia, dan STKIP Kusuma Negara, juga pernah menjadi staf di Unit Implementasi Kurikulum (UIK) Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (2015). Saat ini merupakan Peneliti Bidang Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Anggi Afriansyah memiliki fokus kajian sosiologi pendidikan. Aktif menulis di media cetak maupun *online*. Beberapa tulisannya sudah dimuat di Koran Berita Cianjur, Jawa Pos, Koran Jakarta, Media Indonesia, Harian Republika, Lampung *Post*, Radar Bangka, Radar Tasikmalaya, Padang Ekspres, NU Online, dan [gusdurian.net](http://gusdurian.net). Dapat dihubungi melalui [afriansyah.anggi@gmail.com](mailto:afriansyah.anggi@gmail.com).

## PEDOMAN PENULISAN

1. Tulisan yang dimuat harus merupakan kajian ilmiah atas isu dan peristiwa yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan internasional, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
2. Tulisan merupakan karya sendiri, bukan saduran atau terjemahan dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk dan bahasa apa pun.
3. Tulisan mengandung data atau pemikiran yang baru dan orisinal.
4. Tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis yang bersangkutan.
5. Panjang naskah untuk artikel, 20-25 halaman A4, spasi 1,5; *book review*, 10-15 halaman A4, spasi 1,5.
6. Sistematika artikel hasil pemikiran/telaahan adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

### JUDUL

#### Penulis

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

*Abstract: Abstract in English (max. 150 words)*

*Keywords: 4 – 5 words/ phrase*

**Abstrak:** Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

**Kata Kunci:** 4 – 5 kata/ frasa

#### Pendahuluan

#### Pembahasan

#### Penutup

#### Daftar Pustaka

7. Sistematika artikel review buku (*book review*) adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; judul buku; pengarang; penerbit; cetakan; tebal; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

## **JUDUL**

### **Penulis**

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

Judul buku

Pengarang

Penerbit

Tebal

Abstract: Abstract in English (max. 150 words)

Keywords: 4 – 5 words/ phrase

**Abstrak:** Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

**Kata Kunci:** 4 – 5 kata/ frasa

### **Pendahuluan**

### **Pembahasan**

### **Penutup**

### **Daftar Pustaka**

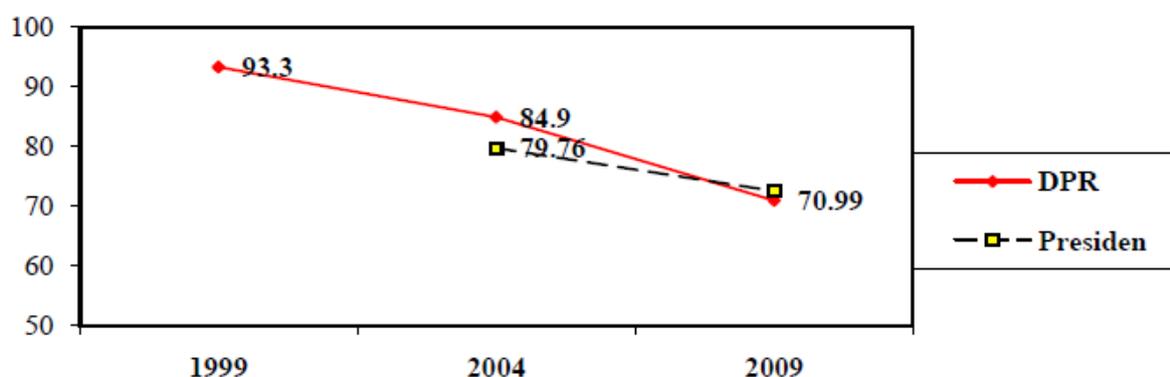
8. Tabel dan gambar, untuk tabel dan gambar (grafik) di dalam naskah harus diberi nomor urut.
  - a. Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar.
  - b. Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.
  - c. Garis tabel yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis paling bawah tabel. Sedangkan untuk garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan.

Contoh penyajian Tabel:

**Tabel 1.** Agenda-agenda Besar Konsolidasi

Domain	Vertikal	Horizontal
Internal	Pemantapan kepengurusan partai hingga level terendah Sosialisasi agenda politik	Pemantapan soliditas elite partai pada level DPP Pemantapan agenda politik menyambut pemilu
Eksternal	Pembangunan, pemeliharaan dan pemantapan dukungan masyarakat	Penjajagan koalisi dengan partai-partai lain dan kalangan institusi-institusi nonpolitik

Contoh penyajian Gambar/Grafik:



Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

**Grafik 2.** Tren Partisipasi dalam Pemilu

9. Perujukan sumber acuan menggunakan *footnotes*, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **Format rujukan dari buku:** nama penulis, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, nomor halaman, titik. Contoh:  
Denny J.A., *Partai Politik Pun Berguguran*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. v.
  - b. **Format rujukan dari buku (bunga rampai):** nama penulis artikel, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik”, dalam, nama editor buku, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, h., nomor halaman, titik. Contoh:  
Leonardo Morlino, “Political Parties and Democratic Consolidation in Southern Europe,” dalam Richard Gunther, P. Nikiforos Diamandouros dan Hans Jurgen Puhle (eds.), *The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective*, (Baltimore MD: Johns Hopkins University Press, 1995), h. 315–388.
  - c. **Format rujukan dari jurnal:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber artikel (*italic*), nomor atau edisi, tahun, h., nomor halaman, titik. Contoh:  
Lili Romli, “Peta Kekuatan Politik Setelah Reformasi dan Kecenderungan Koalisi Parpol,” *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 2000, h. 124-125.

- d. Format rujukan dari makalah seminar/konferensi:** nama penulis, “judul makalah ditulis tegak dalam dua tanda petik,” makalah, nama/tema seminar, tempat pelaksanaan seminar, waktu, h., nomor halaman, titik. Contoh:

Andrea Ceron dan Alessandra Caterina Cremonesi, “*Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media*,” makalah disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013, h 3.

- e. Format rujukan dari media online:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” nama situs, tanggal akses situs. Contoh:

Berita8, “Media Sosial bisa Perkuat Fungsi Partai Politik”, 18 April 2013, <http://www.berita8.com/berita/2013/04/MediaSosial-bisa-perkuat-fungsi-partai-politik>, diakses pada tanggal 18 Juni 2013.

- f. Format rujukan dari media massa:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber media (*italic*), tanggal terbit, nomor halaman, titik. Contoh:

Degung Santikarma, “Monumen, Dokumen dan Kekerasan Massal,” Kompas, 1 Agustus 2003, h. 12.

10. Penulisan sumber Daftar Pustaka dibedakan menjadi: buku; jurnal; laporan dan makalah; surat kabar dan website. Daftar Pustaka dituliskan dengan urutan abjad nama belakang (*family name*). Format penulisan sebagai berikut:

- a. Format rujukan dari buku:**

Buku dengan satu pengarang: nama penulis; tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Caplan, Bryan. 2007. *The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies*. New Jersey: Princeton University Press.

Buku dengan dua pengarang: nama penulis (dua orang); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Aspinall, E. dan M. Mietzner. 2010. *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

Buku dengan lebih dari dua pengarang: nama penulis (et al); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Ananta, Aris, et al., 2004. *Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective*. Singapore: ISEAS Publishing.

Artikel/tulisan dalam buku: nama penulis; tahun terbit; judul tulisan; dalam nama editor; judul buku; tahun terbit; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Qodari, M. 2010. “The Professionalisation of Politics: The Growing Role of Polling Organisation and Political Consultants”, dalam Aspinall, E. dan M. Mietzner (eds.). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

- b. Format rujukan dari jurnal:** nama penulis; tahun; judul artikel; nama jurnal; volume jurnal; nomor jurnal; nomor halaman. Contoh:

Ufen, A. 2008. "From Aliran to Dealignment: Political Parties in post-Suharto Indonesia". *South East Asia Research*, 16 (1): 5-41.

**c. Format rujukan dari laporan dan makalah:**

Laporan penelitian: nama penulis; tahun terbit; judul laporan; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Mainwaring, Scott, 1998. "Rethinking Party Systems Theory In The Third Wave Of Democratization: The Importance of Party System Institutionalization." *Working Paper* #260 - October 1998, Kellogg Institute.

Makalah seminar: nama penulis; tahun terbit; judul makalah; nama kegiatan seminar; waktu pelaksanaan kegiatan seminar; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Ceron, Andrea dan Alessandra Caterina Cremonesi. 2013. "Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media". Paper disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013.

**d. Format rujukan dari surat kabar dan website**

Artikel media massa: nama penulis; tahun terbit; judul artikel; nama media massa; tanggal terbit; nomor halaman. Contoh:

Wahid, Sholahuddin. 1998. "Di Balik Berdirinya Partai-Partai di Kalangan NU," *Republika*, 3 Oktober.

Artikel online: nama penulis/institusi; tahun terbit; judul artikel, alamat websites; waktu unduh. Contoh:

Aspinall, Edward, "The Taming of Ethnic Conflict in Indonesia", dalam <http://www.eastasiaforum.org/2010/08/05/the-taming-of-ethnic-conflict>, diunduh pada 28 November 2013.

**11. Pengiriman Artikel:**

- ✓ Naskah dikirim dalam bentuk *printout* sebanyak 2 eksemplar beserta *softcopy* ke alamat redaksi atau dapat dikirimkan melalui email redaksi ([penerbitan.p2p@gmail.com](mailto:penerbitan.p2p@gmail.com)).
- ✓ Redaksi memberikan honorarium untuk setiap artikel yang dimuat.
- ✓ Artikel yang diterima setelah *deadline* akan dipertimbangkan untuk dimuat pada edisi berikutnya.
- ✓ Artikel dapat dikirimkan melalui website e-journal dengan alamat <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp> dengan cara mendaftar secara *online*.

**12. Alamat Jurnal Penelitian Politik:**

P2P-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III dan XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Fax. (021) 520 7118

**13. Langganan:**

Harga Pengganti ongkos cetak Rp.75.000,- per eksemplar sudah termasuk ongkos kirim biasa. Untuk berlangganan dan surat menyurat langsung hubungi bagian sirkulasi Redaksi Jurnal Penelitian Politik.

# Informasi Hasil Penelitian Terpilih

